

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan negara kesejahteraan, pemerintah dituntut untuk ikut campur dalam segala aspek kehidupan sosial. Tak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan upaya revitalisasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Program Kampung KB (Keluarga Berencana).

Kampung Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga ataupun masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran, miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil, DAS (Daerah Aliran Sungai), dan wilayah nelayan. Kampung Keluarga Berencana juga dikembangkan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memprioritaskan daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Tujuan diselenggarakannya Program Kampung Keluarga Berencana adalah untuk mengatasi berbagai macam kondisi objektif permasalahan kependudukan yang disusun kedalam empat isu strategis diantaranya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Dalam

menangani isu tersebut maka pemerintah mengadakan suatu program atau kebijakan yaitu Program Kampung Keluarga Berencana. Oleh sebab itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengaktifkan dan mengembangkan kembali program Kampung Keluarga Berencana.

Adapun dasar hukum dari diselenggarakannya program Kampung KB, ialah peraturan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program KB Daerah.

Program Kampung Keluarga Berencana juga dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sesuai dengan dasar hukum dari penyelenggaraan Program Kampung KB dan sejalan dengan Visi Cermat tahun 2016 hingga 2018.

Visi Cermat merupakan salah satu tujuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, rasional, maju, agamis, dan sehat yang berbasis pada pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah. Cerdas mengandung pengertian bahwa seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan menguasai

informasi; produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan inovatif; dan jujur, beretika, mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial.

Rasional mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur. Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan perangkat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehat mengandung pengertian bahwa setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Pengembangan potensi wilayah merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah yang lebih baik tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan perkapita di semua lapisan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Pengurangan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama mengandung arti bahwa perwujudan pembangunan yang adil dan merata tanpa diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat. Pemberdayaan potensi wilayah merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten

Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan, serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik, meliputi terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan; berkembangnya kehidupan sosial budaya yang konstruktif; tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan kampung keluarga berencana harus sejalan dengan Visi Cermat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung KB (Keluarga Berencana) Sawijaya RW 06 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan rohani, masih adanya kekerasan dalam rumah tangga, masih kurangnya informasi mengenai usia kawin yang ideal, belum adanya fasilitas dan pelatihan keterampilan bagi anak yang putus sekolah, kegiatan donor darah belum dilaksanakan di daerah tersebut, masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu, masih banyaknya jumlah pengangguran yang ditemukan di daerah tersebut, masih rendahnya modal usaha bagi pengusaha kecil,

masih ditemukannya warga yang belum memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga, masih banyaknya warga yang belum memanfaatkan tanah pekarangan secara efektif, dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Selain permasalahan di atas, peneliti menemukan data mengenai data jumlah penduduk dan data jumlah balita, remaja, dan lansia pada tahun 2016 di Kampung KB Sawi Jaya RW 06 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan tabel mengenai data tersebut.

Tabel 1.1.1
Data Jumlah Penduduk Kampung KB

No	Nama RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01	110	204	175	379
2	02	123	254	201	455
3	03	93	154	142	286
4	04	50	80	76	156
5	05	57	87	73	160
Jumlah		433	779	667	1446

Sumber: Kampung KB Sawijaya Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Tabel 1.1.2
Data Balita, Remaja, dan Lansia Kampung KB

No	RT	Jumlah		
		Balita	Remaja	Lansia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	36	88	44
2	02	48	104	39
3	03	37	52	23
4	04	17	39	21
5	05	12	45	16
Jumlah		150	328	143

Sumber: Kampung KB Sawijaya Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016

Selain itu, terdapat empat macam isu strategis dalam Program Kampung Keluarga Berencana ini yaitu pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk serta pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Pengendalian kuantitas penduduk ini lebih diarahkan pada upaya untuk mengendalikan jumlah kelahiran di mana pada tahun 2016 angka usia nikah pertama masyarakat masih rendah dan berada pada kisaran 18,75. Sedangkan, angka Total Fertility Rate (TFR) terhitung tinggi yaitu berada pada kisaran 2,6. Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh perempuan pada akhir masa reproduksi di mana perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Oleh karena itu, maka dalam mengendalikan jumlah kelahiran pemerintah melaksanakan suatu langkah yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, dimana usia minimal perkawinan bagi wanita adalah 21 tahun sedangkan untuk usia minimal perkawinan bagi pria adalah 25 tahun. Oleh karena itu, penyebab terjadinya peningkatan jumlah kelahiran adalah masih ditemukannya masyarakat yang memilih menikah muda yaitu pada usia di bawah 20 tahun untuk wanita serta dibawah 25 tahun untuk pria.

Pengembangan kualitas penduduk yang lebih berkonsentrasi pada masalah derajat kesehatan ibu dan anak, peningkatan potensi ekonomi keluarga, pemantapan ketahanan keluarga, dan tingkat pendidikan. Masalah derajat kesehatan ibu dan anak terjadi karena rendahnya tingkat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Rendahnya tingkat kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan anak disebabkan karena masih kurang diperhatikannya kesehatan pada ibu dan anak, sistem pelayanan kesehatan yang lambat, biaya untuk berobat yang mahal, serta kurang efektifnya pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu dan anak. Peningkatan potensi ekonomi keluarga dilakukan karena untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan pada suatu keluarga yang selalu meningkat. Pemantapan ketahanan keluarga merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan peran keluarga serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Alasan pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan pemantapan ketahanan keluarga karena peran keluarga masih rendah serta tingkat kesejahteraan dalam keluarga masih rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu permasalahan serius di mana pada setiap tahunnya tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong relatif rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, rendahnya penerimaan pendapatan per kapita, kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, serta keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah. Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan di mana masih banyak anggapan yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi sehingga hal ini menyebabkan bahwa kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan masih rendah.

Rendahnya penerimaan pendapatan per kapita di mana hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan orangtua dalam menyekolahkan anaknya atau tidak menyekolahkan anaknya sama sekali. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, biasanya hal ini terjadi di pedesaan atau daerah-daerah terpencil.

Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau di masyarakat. Selain itu juga, faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalny biaya pendidikan. Oleh karena itu, alasan pemerintah melakukan upaya pengembangan kualitas penduduk disebabkan karena rendahnya tingkat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya masalah derajat kesehatan ibu dan anak, meningkatnya jumlah angka kemiskinan yang dapat mengakibatkan rendahnya potensi ekonomi pada suatu keluarga, ketidakrukunan dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan terjadinya ketidaktahanan berdirinya suatu keluarga, rendahnya tingkat kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, rendahnya penerimaan pendapatan per kapita, kurang memadainya sarana dan perasana pendidikan serta keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan di masyarakat.

Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain atau juga dapat dikatakan sebagai perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Pengarahan mobilitas penduduk ini tidak hanya disebabkan oleh perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang, tetapi juga mobilitas penduduk lebih dihadapkan pada perpindahan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena

masih ditemukannya penduduk yang tidak nyaman dengan pekerjaannya sehingga melakukan perpindahan yang berhubungan dengan pencarian lapangan kerja yang baru. Oleh karena itu, alasan pemerintah melakukan pengarahannya mobilitas penduduk karena ketidaknyamanan penduduk dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga hal ini menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk atau migrasi.

Pengembangan sistem informasi dan administrasi kependudukan berkaitan dengan penyediaan data mikro keluarga yang merupakan bagian dari mekanisme operasional di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan, yaitu masih kurang lengkapnya data yang berkaitan dengan keluarga dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan sistem informasi dan administrasi kependudukan.

Penjelasan diatas memperlihatkan bagaimana pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan penduduk yang terjadi di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Mengacu pada paparan di atas dalam memahami dan memecahkan masalah kependudukan di Kabupaten Bandung Barat, maka perlu dan penting dilakukan penelitian mengenai analisis Program Kampung Keluarga Berencana dalam mengendalikan penduduk. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK DI DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi ialah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan dan implementasi kampung keluarga berencana di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat mengenai implementasi kebijakan kampung keluarga berencana di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami tentang implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan serta manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Adapun manfaat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta pengembangan ilmu, terutama ilmu administrasi publik. Penggunaan konsep mengenai perilaku pemerintah dan proses analisis kebijakan yang memiliki hubungan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat mampu memberikan konsep yang baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam merumuskan dan mengimplementasi kebijakan, harus memunculkan pembaharuan pemikiran yang disertai tugas dan wewenang, dimana pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan, untuk mendalami konsep perilaku pemerintah maka perlu dilakukan penekanan pada program pemerintah yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan secara lebih efektif.

1.6 Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan penduduk di Kabupaten Bandung Barat melalui program pemerintah yaitu Kampung Keluarga Berencana yang meliputi tujuan diselenggarakannya program Kampung Keluarga Berencana, dampak dari diselenggarakannya program Kampung Keluarga Berencana, sistem pelaksanaan dari program Kampung Keluarga berencana, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat dari pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana.

1.7 Proposisi Penelitian

Dalam penelitian program Kampung Keluarga Berencana ini, ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan pemerintah mengenai implementasi dari Program Kampung Keluarga Berencana yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Bandung Barat.

